KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA
Jalan Raya Parung Km.22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535
E-mail : bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : https://bbppmpvbispar.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 0836/D6.3/SK/KP/2021

TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2021

KEPALA BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA

Menimbang :

a. sehubungan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Keputusan Mendikbud Nomor 62239/MPK/HS/KP/2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, selanjutnya disebut Tim Kerja Pembangunan Menuju WBBM, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBBM mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengidentifikasi pelaksanaan program reformasi birokrasi internal di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata;
b. mendampingi tim RBI di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata;
c. mengidentifikasi plaksanaan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata;
d. mengidentifikasi pelaksanaan Quick Wins di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata;
e. mengidentifikasi pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar

Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata;

f. mengidentifikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata;

g. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

KETIGA : Masa jabatan Tim Kerja Pembangunan menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir sampai dengan pencanangan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ini dibebankan kepada anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata yang relevan.

KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
tanggal, 29 Januari 2021
KEPALA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

Sabli, S.H, M.H.
NIP. 196405021993031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
2. Inspektorat Jenderal Kemendikbud
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
4. Yang Bersangkutan
5. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Nomor : 0836 /D6.3/SK/KP/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGEMBANGN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA TAHUN 2021 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	H. Sabli, S.H, M.H.	Kepala Balai	Pengarah ZI-WBBM
2.	Drs. Edy Riesmunandar,M.M	Koordinator Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi	Penanggungjawab ZI-WBBM
3.	Dr. Akhirudin, S.H., S.Pd., M.Pd.	Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi	Penanggungjawab ZI-WBBM
4.	Nana Halim, S.E. , M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua Tim ZI-WBBM
5.	**Brian Gutama, S.Sos**	**Sub Koordinator DAI**	**Penanggungjawab Manajemen perubahan**
6.	Tri Kartika W, M.Kom	Analis Data dan Informasi	Anggota Manajemen perubahan
7.	Profillia Putri, S.Si, M.Pd.	Widyaiswara	Anggota Manajemen perubahan
8.	Rizki Respati Prabowo, S.Pd.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Anggota Manajemen perubahan
9.	**Dr. Nining Dwirosanti, S.Psi, M.S.i**	**Sub Koordinator Program dan Kerjasama**	**Penanggungjawab Bidang Penguatan Tata Laksana**
10.	Waluyo,S.Pd, M.M	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Anggota Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana
11.	Rosalina Wahyuningtyas, S.E., M.M.	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Anggota Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana
12.	Dian Pratiwi, S.Pd.	Pengadministrasi pelatihan	Anggota Koordinator Bidang Penguatan Tata Laksana
13.	**Cucu Surachman,S.St, M.Ed**	**Sub Koordinator Tata Laksana, Kepegawaian dan RBI**	**Penanggungjawab Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur**
14.	Lili Husada, SST.Par	Analis Tatalaksana	Anggota Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Ida Aru Wirdaningsih, S.E.	Analis Tatalaksana	Anggota Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
16.	**Wilia Ningsih, S.E., M.Pd.**	**Sub Koordinator Perencanaan Penganggaran**	**Penanggungjawab Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

17.	Erpin Juanita Nababan, S.Pd	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
18.	Victor Imanuel Nahumury, S.E., MM	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
19.	Lugina Aulya Zaman, S.T.	Verifikator Keuangan	Anggota Bidang Penguatan Akuntabilitas
20.	**Zulfikar,ST, MKKK**	**Sub Koordinator Fasilitasi Peningkatan Kompetensi**	**Penanggungjawab Bidang Penguatan Pengawasan**
21.	Mohammad Moudika Akbar, SST.Par.	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
22.	Rifky Kurniawan, S.Pd	Analis Program Diklat	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
23.	Nanang Rukmana, S.E., Akt.	Widyaiswara	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
24.	Mayanti, S.Pd., M.M.	Bendahara	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
25.	Djuairiah, S.Pd.	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	Anggota Bidang Penguatan Pengawasan
26.	**Supriyono, S.Pd.**	**Sub Koordinator Kerumahtanggaan Humas dan BMN**	**Penanggungjawab Bidang Peningkatan layanan Publik**
27.	Wawan Saepul Irwan, S.Pd., M.Si	Analis Barang Milik Negara	Anggota Bidang Peningkatan layanan Publik
28.	Wahyu Setiadi	Penyusun Bahan Informasi dan publikasi	Anggota Bidang Peningkatan layanan Publik
29.	Shinta Dewi Atseno, S.Kep., Ners	Penyusun Bahan Informasi dan publikasi	Anggota Bidang Peningkatan layanan Publik
30.	**Sarah Annisa, S.E..**	**Sub Koordinator Penjaminan Mutu**	**Penanggungjawab Tim Survei Internal, Ekternal dan Media Sosial**
31.	Indria nancy, M.M	Analis Diklat	Anggota Bidang Tim Survei Internal, Ekternal dan Media Sosial
32.	Daru Kristanto, SE	Analis Diklat	Anggota Bidang Tim Survei Internal, Ekternal dan Media Sosial
24	Hardiyanto, ST	Pengelola Situs/Web	Sekretariat
25	Yendri	Pengadministrasi Umum	Sekretariat

26	Liyani, MT	Pengelola Data Tata organisasi dan Tata laksana	Sekretariat
27	Sumirahayu, S.Pd.	Pengadminitrasi Keuangan	Sekretariat
28	Tatang, S.E	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Sekretariat
29	Kuat Dwiyono	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat
30	Yudhi Aryo Yulianto, S.E.	Pengolah Data	Sekretariat
31	Titin Agustini	Pengadminitrasi Kepegawaian	Sekretariat
32	Pratiwi Rindansari, SE	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat

KEPALA

Sabli, S.H, M.H.
NIP. 196405021993031002